

## Pengaruh Kebijakan Impor Beras Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Klaten

Lia Safitri, Sakir Ridho Wijaya, Fairuz Arta Abhipraya  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [lia.safitri.isip.20@mail.umy.ac.id](mailto:lia.safitri.isip.20@mail.umy.ac.id)

### Abstract

*Rice import policy has become one of the strategic issues in Indonesia's food governance because it is closely related to food security, price stability, and farmers' welfare. This study aims to analyze the impact of rice import policies on farmers' welfare in Klaten Regency, Central Java, which is known as one of the major rice-producing regions in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive approach using library research methods by collecting data from scientific literature, government regulations, statistical reports, and relevant news sources. The findings indicate that rice import policies generate both supportive and opposing responses among stakeholders. The government considers imports necessary to maintain national rice stocks and stabilize food supplies, while farmers and several regional stakeholders perceive imports as potentially reducing grain prices during harvest seasons and negatively affecting farmers' incomes. The study also reveals that farmers' welfare can be assessed through indicators such as the Farmers' Terms of Trade (NTP), agricultural productivity, and income levels. Therefore, government policies should prioritize strengthening domestic agricultural production, improving farmers' access to production resources, and optimizing the absorption of local rice production before implementing import policies. These efforts are expected to support sustainable food security while improving farmers' welfare.*

**Keywords:** *Rice Import Policy, Farmers' Welfare, Food Security, Farmers' Terms Of Trade, Klaten Regency.*

### Abstrak

*Kebijakan impor beras menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pangan di Indonesia karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan impor beras terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi beras nasional. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan statistik, serta berbagai sumber berita yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan impor beras menimbulkan respons pro dan kontra dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah menilai impor diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok pangan nasional dan stabilitas pasokan beras, sedangkan petani dan sebagian pemangku kepentingan daerah menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan harga gabah pada saat panen raya sehingga dapat mengurangi pendapatan petani. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan petani dapat diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP), produktivitas pertanian, dan tingkat pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, serta optimalisasi penyerapan hasil panen sebelum menerapkan kebijakan impor beras. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.*

**Kata kunci:** *kebijakan impor beras, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, nilai tukar petani, Kabupaten Klaten.*

---



## **PENDAHULUAN**

Impor merupakan proses pengiriman barang komoditas dari satu negara ke negaralain secara resmi, biasanya prosedur perdagangan. dalam jumlah besar biasanya barang impor memerlukan trobisan dari bea cukai di negara penerima maupun negara pengirim. Salah satu bagian terpenting dalam perdagangan internasional adalah kegiatan impor. Impor mengacu pada proses, metode, dan perilaku impor. Kegiatan impor dan ekspor dilakukan sesuai dengan UU No. 30 dan UU No. 2. No. 17 Tahun 2006 1. Keputusan Nomor 10 Tahun 1995 "UU Daerah Pabean" Nomor 39 Tahun 2007, Perubahan Nomor 1 Tahun 11 November 1995, tentang Pajak Konsumsi. Undang-undang No.17 tahun 2006, menetapkan bahwa kegiatan impor adalah suatu kegiatan menyalurkan barang komoditas ke daerah pabean, dalam hal ini yaitu wilayah negara Indonesia. Sementara itu berdasarkan undang-undang diatas menyatakan bahwa kegiatan ekspor mengarah pada aktivitas mengeluarkan barang komoditas dari daerah pabean. Kata ekspor dan impor mengarah pada kesepakatan bisnis internasional (International Business) atau disebut perdagangan Internasional (International Trade). Perdagangan Internasional yaitu perniagaan yang mengikutsertakan pihak-pihak lebih dari satu negara. Unsur pertama perjanjian impor dan ekspor adalah tindakan penjual menyerahkan barang kepada konsumen. Unsur kedua dari perjanjian impor dan ekspor adalah pelunasan.

Berhasilnya swasembada beras pada tahun 1984, nyatanya tidak mampu mencukupi kebutuhan domestik sehingga pemerintah mengambil rencana untuk mengimpor beras. sulitnya swasembada untuk mempertahankan kebutuhan domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, turunnya tingkat produksi beras, semakin turun nya lahan pertanian yang sudah digunakan untuk

membangun gedung-gedung, serta faktor cuaca dan iklim yang terjadi di Indonesia.

Kabupaten Klaten merupakan suatu daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten pernah menjadi penghasil beras paling utama di Jawa Tengah. Produktivitas beras Kabupaten Klaten mencapai 6,3 ton gabah per hektar, dan total luas tanam padi mencapai 72.000 hektar, sehingga Kabupaten Klaten berhasil mencapai surplus beras sekitar 141.000 ton pada tahun 2020.

Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu indeks kesejahteraan petani yang dihitung berdasarkan barometer antara kumpulan harga yang diambil oleh petani dan kumpulan harga yang harus dibayarkan oleh petani. Selain NTP juga terdapat NTUP yang merupakan indeks guna mengetahui ambang kesejahteraan petani dari keseluruhan usaha pertanian. Sebab itu, ungkapan bahwa kesejahteraan petani berkurang karena penurunan NTP tidak tepat. Pada bulan Juli tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan nilai tukar petani (NTP) sebelumnya, bahkan mencapai 100,09 atau meningkat 0,49%. Alasan kenaikan NTP adalah dikarenakan kumpulan harga yang diterima para petani naik 0,47%.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk mengenal kesejahteraan petani dan masyarakat serta untuk melihat perkembangan impor beras di Kabupaten Klaten. Penelitian ini mengambil kasus Kabuapten Klaten. pengambilan data dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder yang diperoleh dari Jurnal, Website, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Impor**

### **a. Pengertian Impor**

Impor merupakan proses pengiriman barang komoditas dari satu negara ke negaralain secara resmi, biasanya prosedur perdagangan. dalam jumlah besar biasanya barang impor memerlukan trobisan dari bea cukai di negara penerima maupun negara pengirim. Salah satu bagian terpenting dalam perdagangan internasional adalah kegiatan impor. Impor mengacu pada proses, metode, dan perilaku impor.

Andi Susilo (2013:135) mengatakan bahwa Impor adalah kegiatan untuk menyalurkan barang komoditas dari satu negara ke negara pabean. Artinya, dalam perihal ini, kedua negara yang terlibat biasanya terwakili oleh kepentingan dua perusahaan antara kedua negara yang memiliki kepentingan berbeda. Satu negara bertindak sebagai negara yang pengimpor (penerima) dan negara lain bertindak sebagai negara pengeksport (pemasok). I Komang Oko Berata (2013: 7), mengatakan bahwa Impor merupakan tindakan membawa barang dari luar Indonesia (disebut juga daerah pabean) ke dalam wilayah daerah pabean Indonesia.

### **b. Komoditi Dalam Impor**

Ali Purwito dan Indriani (2015:11) mengatakan bahwa Klasifikasi komoditas berikut biasanya didasarkan pada tujuan penggunaannya, yakni :

a. bahan baku dasar atau bahan terkait di dalam negeri dan melalui impor, juga dapat memenuhi bahan baku yang mengandalkan industri dalam negeri dan perniagaan internasional.

b. barang konsumsi, barang konsumsi merupakan benda yang diterima oleh sebagian importir, yaitu komoditas digunakan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

c. minyak bumi dan mineral, komoditas ini sangat dibatasi dalam kegiatan ekspor, misalnya untuk memberikan nilai tambah

maka diberi kewajiban untuk membangun kilang.

### **2. Indikator kesejahteraan petani dan masyarakat**

Pertanian adalah sektor yang paling diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah wajib memiliki program yang dapat mendukung, khususnya di bidang pertanian. Sektor pertanian sudah dijadikan sebagai sumber dan mata pencaharian bagi masyarakat. Banyak masyarakat bertani karena dinilai dapat memberikan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa indikator yang dapat memengaruhi pendapatan para petani yaitu, lambatnya peningkatan harga jual hasil produktivitas.

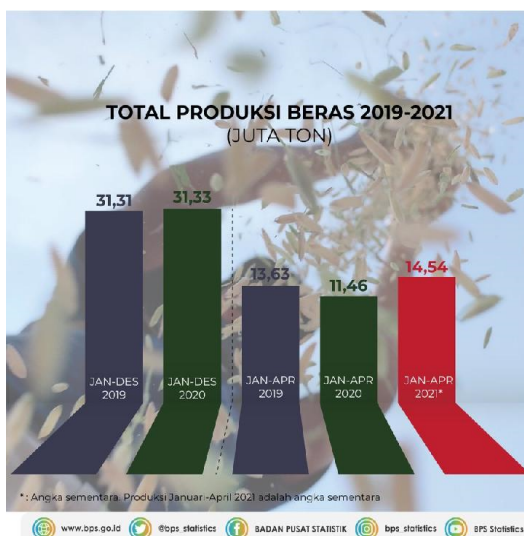
Indikator kesejahteraan dan ketahanan pangan petani beras diharapkan dapat menciptakan harga komoditas yang stabil sehingga menguntungkan petani dan meningkatkan produksi. Rencana tarif impor beras dilakukan dengan melindungi harga komoditas. Demi menciptakannya kestabilan harga beras maka dibuatlah rencana untuk mengutungkan para petan dalam negeri dan meningkatkan hasil produksi beras untuk mendukung rencana ketahanan pangan.

Pemerintah bersama DPR membuat Undang-Undang Dasar no 18 2012 terkait pangan dan Undang-Undang Dasar no 19 tahun 2012 terkait pertahanan dan memantapkan Petani untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dengan bertani masyarakat dapat menambah devisa negara pula, dikarenakan produksi beras di wilayah pulau jawa tidak lagi diragukan kualitasnya. Kualitas beras di wilayah pulau jawa juga didukung dengan keadaan iklim dan letak astronomisnya, terkhusus letak astronomis kabupaten Klaten.



Kabupaten Klaten merupakan daerah yang mempunyai peran sebagai daerah produksi beras. Kabupaten Klaten pernah menjadi daerah dengan hasil panen yang melimpah, dan pernah menyandang “lumbung padi”. Kabupaten Klaten pernah menjadi penghasil beras paling utama di Jawa Tengah. Produktivitas beras Kabupaten Klaten mencapai 6,3 ton gabah per hektar, dan total luas tanam padi mencapai 72.000 hektar, sehingga Kabupaten Klaten berhasil mencapai surplus beras sekitar 141.000 ton pada tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa dekade berhasil menjadi salah satu Provinsi penopang produksi beras nasional, disamping Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Beras Delanggu merupakan salah satu penghasil beras di Kabupaten Klaten.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan parameter kesejahteraan petani yang dihitung berdasarkan perbandingan antara barometer harga yang harus dikeluarkan petani dan barometer harga yang harus diterima petani. Selain NTP juga terdapat NTUP yang merupakan indeks guna mengetahui ambang kesejahteraan petani dari keseluruhan usaha pertanian. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kesejahteraan petani berkurang akibat penurunan NTP tidaklah akurat.

Pada bulan Juli tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan nilai tukar petani (NTP) sebelumnya, bahkan mencapai 100,09 atau meningkat 0,49%. Alasan kenaikan NTP adalah karena barometer harga yang diterima petani mengalami kenaikan 0,47%.

Kenaikan NTP membuktikan bahwa pemerintah harus bekerja keras pasca penurunan NTP bulan lalu. Selain itu, harga beras dan beras yang belum dikupas di pabrik juga mengalami perkembangan yang baik. Menurut catatan, GKP mencapai 60,28%, Gandum kering giling (GKG) mencapai 20,81%, dan perdagangan biji-bijian berkualitas tinggi mencapai 18,91%. Dengan demikian diperkirakan pada bulan Juli harga GKP petani akan mencapai Rp. Rp.4.883 / Kg atau naik 1,32, kecepatan gerinda 4,788 / Kg atau naik 1,44% atau naik 1,44%.

Kemiskinan sangat berpengaruh dengan kesejahteraan. Kesejahteraan terlihat dari meningkatnya daya beli dan terpenuhinya kebutuhan dasar. (Habibullah, 2020) mengatakan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di negara Indonesia khususnya kemiskinan pedesaan yang berhubungan langsung dengan Kesejahteraan petani yaitu pendapatan perkapita petani, upah petani dan tingkat inflasi Nilai tukar petani (NTP) yaitu perbandingan antara barometer yang dibayarkan petani dengan barometer yang

diperoleh petani, menyatakan dalam bentuk persentase . (BPS, 2019).

Secara keseluruhan kaitan kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai keterkaitan yang cukup erat, kendati berpengaruh negative akan tetapi terdapat pula banyak faktor yang mewujudkan 2 faktor ini positif. Seperti yang diketahui walau NTP mengalami kenaikan sama halnya dengan kemiskinan yang berangsur naik pula, kondisi ini dikarenakan Sumber daya Manusia yang kurang memahami tentang teknologi modern yang mengakibatkan para petani kurang memadai di bidang teknologi.

Dalam rangka meningkatkan harga produksi di sektor pertanian dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), namun dalam hal ini demi meningkatkan harga produksi di sektor pertanian pemerintah berperan sangat penting. Guna menaikkan harga hasil pertanian, jika produk memiliki nilai ekspor lebih tinggi bisa dilakukan, karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani dan perlu meningkatkan kualitas produksi.

### 3. Polemik Impor Beras Pro dan Kontra

Dalam ekonomi politik ada beberapa aktor yang berperan penting dalam memengaruhi roda perekonomian salah satunya tentang kebijakan impor. Aktor yang sangat berperan penting yaitu kementerian pertanian, Bulog, kementerian perdagangan, dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Untuk melihat para aktor tersebut pro atau kontra impor beras dapat dilihat dari bagaimana cara menggunakan wewenangnya, jika aktor menyetujui dan mendukung kebijakan impor beras maka aktor tersebut dapat terlihat pro terhadap kebijakan impor beras dan juga sebaliknya jika aktor tersebut mempersulit dan menolak terhadap kebijakan impor maka aktor tersebut dapat dikatakan kontra terhadap kebijakan impor beras.

Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa pemerintah tidak akan melaksanakan

rencana impor beras hingga bulan Juni 2021. Joko Widodo mengakui pemerintah memang menjalankan MoU dengan negara Vietnam dan Thailand terkait dengan pengadaan beras.

Berdasarkan keputusan pemerintah, tahun 2021 akan melakukan impor beras yang mendatangkan kontroversi di masyarakat. Banyak masyarakat yang menentang dengan adanya keputusan pemerintah perihal impor beras yang dinilai kurang efektif. Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras pada saat petani sedang melakukan panen raya. (Abidin, 2015) di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai daerah penghasil beras, Bupati Klaten sendiri tidak menyetujui dengan keputusan pemerintah yang akan melakukan impor beras. Pasalnya, beras dari hasil panen para petani dinilai sudah cukup melimpah. Terlepas dari penolakan Bupati Klaten para petani juga tentunya menolak jika rencana impor beras benar dilakukan.

Rencana impor beras menuai pro dan kontra di kalangan pemerintah. Pemerintah harusnya lebih memprioritaskan hasil panen petani dibandingkan dengan mengimpor beras. Hal ini didukung dengan kondisi di berbagai wilayah di Indonesia sedang melakukan panen raya. Komisi IV DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan berbagai pihak terkait dengan rencana impor beras.

PERBANDINGAN REALISASI PENGADAAN DALAM NEGERI PERUM BULOG TAHUN 2014 - 2018

Bulan	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018 *
Januari	4.683	-	641	4.148	5.467
Februari	23.685	-	4.193	48.884	26.876
Maret	212.634	30.964	167.950	425.556	215.103
April	591.555	430.559	649.867	424.064	351.630
Mei	557.113	661.741	572.459	218.170	272.124
Juni	317.738	385.726	406.485	155.605	133.044
Juli	205.224	194.344	162.416	277.782	238.172
Agustus	165.863	90.231	287.224	202.310	94.559
September	198.999	22.985	240.173	196.432	
Oktober	62.783	67.359	207.500	122.222	
November	9.169	61.328	165.353	65.146	
Desember	355	21.265	97.244	20.907	
Jumlah	2.349.802	1.966.503	2.961.505	2.161.225	1.336.976
Semester I	1.707.409	1.508.990	1.801.595	1.276.427	1.004.245
Semester II	642.393	457.513	1.159.910	884.798	332.731

\* Realisasi pengadaan gabah beras s/d tanggal 22 Agustus 2018

Sumber: bkp Kementerian Pertanian

Indonesia menerima impor beras dari beberapa negara hanya sekitar 1,8 juta ton, apalagi kementerian perdagangan sudah mengeluarkan izin impor beras 2 juta ton. Penyerapan beras dalam negeri Bulog per semester menunjukkan tren menurun. Karena itulah, pihaknya telah memperingatkan untuk intervensi nyata.

Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini melaporkan harga Gabah Kering Panenn (GKP) ditingkat petani turun 0,38% per kilogram, dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp. 4.663. Pada tingkat penggilingan turun 0,48% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 4.716 rupiah. . Sementara itu, harga rata-rata per kilogram sekam kering di tingkat petani turun 2,88% dari bulan sebelumnya menjadi Rp5.206, sedangkan di tingkat penggilingan harga rata-rata turun 2,84% menjadi Rp5.313

Pemerintah mengatakan, program impor beras dinilai sangat diperlukan, ada beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain :

1. Pelaksanaan program impor beras guna memenuhi kebutuhan stok beras dalam negeri guna mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi.
2. Distribusi produksi beras yang tidak merata di berbagai provinsi mengakibatkan daerah-daerah mengalami surplus dan defisit beras.
3. Dampak cuaca terhadap hasil telah menyebabkan penurunan kualitas gabah.

Sementara itu terkait dengan ketimpangan produksi beras antar provinsi, karena adanya surplus dan defisit beras antar provinsi, dengan adanya kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk impor beras, karena jalan keluar yang harus diprioritaskan yaitu memperoleh koordinasi antar daerah. Bhima Yudhistira, mengemukakan ekonom Institute of Economic and Financial Development (INDEF), solusi dari kesenjangan stok beras antar daerah bukanlah dengan cara mengimpor beras. Pada saat panen raya,

penyediaan kelebihan stok beras harus disalurkan ke daerah defisit. (Kompas, 13 Maret 2021).

Jika tindakan pemerintah guna memenuhi stok beras langsung difokuskan pada impor, maka Perum Bulog sendiri sebenarnya belum mencapai kata sepakat. Budi Waseso, mengemukakan Perum Bulog mengedepankan penyerapan produksi beras dalam negeri, kemudian melaksanakan tugas pemerintah dengan melakukan impor 1 juta ton beras tahun ini. Untuk 3 bulan kedepan ditargetkan penyerapan beras adalah 500.000 ton. Pada saat musim panen raya, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog masih menyerap beras di seluruh Indonesia. (Republika, 16 Maret 2021).

#### **4. Pangan dan petani dalam Persfektif Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang dasar 11 November 2009 berkenaan dengan Kesejahteraan Sosial, yaitu suatu keadaan dimana terwujudnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan hidup warga negara untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Kecilnya kapasitas petani dan kemiskinan berakibat pada peningkatan produksi beras. luas lahan garapan para petani hanya sekitar 0,3 hektar. Disisi lain, mayoritas petani belum dapat dikatakan sejahtera dengan hasil pendapatan dari bertani hanya sekitar 30 persen dari total keluarganya.

Demi menstabilkan harga beras pemerintah melakukan kebijakan imoor beras yang tergolong waktunya yang sangat relatif singkat. Di samping itu, pemerintah wajib memerhatikan produksi padi untuk menjaga kestabilan harga beras dalam jangka waktu yang lama. Kemiskinan di kalangan petani masih banyak diterjadi

padahal sudah banyak upaya untuk menaggulangi kemiskinan di kalangan petani. Beberapa upaya sudah dilakukan demi menambahkan membangunkan pendapatan petani. Pemilihan lahan pun sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Tolak ukur yang utama adalah pendapatan petani demi mensejahterakan hidup para petani. Tidakh hanya pendatahn yang menjadi tolak ukur adapun pembangunan petani. Salah satu indikasinya adalah peningkatan produktivitas beras. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan petani yang tinggi, sudah pasti daerah tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi pula.

#### **5. Dampak Kebijakan Impor Beras**

Keputusan untuk menerapkan kebijakan impor beras pada musim panen raya memang menghantam mereka karena langsung berimbas pada dampak penurunan harga beras kering yang dipanen di pasaran, karena turunnya harga GKP pada saat musim puncak biasanya disebabkan oleh penurunan harga GKP pada saat musim panen raya. pasokan yang cukup. Padahal, pertanian merupakan salah satu industri yang secara aktif dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi selama pandemi 2020. Apabila para petani terus merasa tidak didukung dan dirugikan oleh program pemerintah, maka pekerjaan mereka tersebut akan semakin ditinggalkan. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan kondisi tersebut. Pemerintah juga diyakini cenderung mengambil kebijakan pragmatis dan langsung memutuskan untuk mengimpor beras guna mengatasi masalah keamanan beras nasional. Sementara itu, untuk meningkatkan sektor pertanian Negara Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Pada program yang dapat mendorong produksi beras, pemerintah harus memperhatikan

beberapa faktor seperti, perluasan lahan, penyimpanan pangan, pengembangan teknologi, peningkatan daya serap, insentif bagi petani, dan subsidi pupuk.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah seacra nyata menolak adanya rencana kebijakan impor beras di provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Impor beras ini dapat merugikan dan memukul petani pada musim panen raya, serta dapat di nilai mengganggu keberlangsungan hidup para petani. Secara tidak langsung impor beras dapat menyudutkan para petani terhadap besarnya program pemerintah untuk memulihkan swasembada pangan yang pernah dijamah oleh negara Indonesia pada tahun 1984 silam. Selain dapat menyudutkan para petani prpgram impor beras yang di rencanakan oleh pemerintah tersebut dapat membawa dampak turunya harga gabah dikalangan petani, dan juga membatasi petani dalam produktivitas beras dalam negeri, dapat mengurangi devisa negara, dan membuat negara Indonesia menjadi negara yang ketergantungan dengan luar negeri.

Upaya yang ditempuh pemerintah agar tidak terjadinya impor beras yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional, tak hanya itu pemerintah juga melaksanakan promosi peningkatan koordinasi dan usaha agribisnis berasaskan usaha tani padi. Promosi yang di upayakan pemerintah juga menyangkut pengembangan infrastruktur yang mendukung usaha para petani dan untuk meningkatkan akses para petani terhadap sumber modal dan sarana untuk produksi beras.

Dalam rangka meningkatkan harga produksi sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) dapat ditingkatkan, namun dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan harga produksi sektor pertanian. Guna menaikkan harga hasil pertanian, apabila produk tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi, hal tersebut

dapat dilakukan karena dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani dan kualitas produksi perlu ditingkatkan.

Panitia Keempat MPR RI menyatakan dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya bahwa mereka menolak rencana impor beras. Program ini dinilai kurang tepat karena diperkirakan produksi beras hingga Mei sudah berlebih dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam mengutamakan penyerapan hasil panen beras, pemerintah diharapkan menaikkan harga demi kesejahteraan para petani. (dpr.go.id, 23 Maret 2021).

### **KESIMPULAN**

Impor merupakan proses pengiriman barang komoditas dari satu negara ke negaralain secara resmi, biasanya prosedur perdagangan. Dalam jumlah besar biasanya barang impor memerlukan trobisasi dari bea cukai di negara penerima maupun negara pengirim. Salah satu bagian terpenting dalam perdagangan internasional adalah kegiatan impor. Impor mengacu pada proses, metode, dan perilaku impor. Pertanian adalah sektor yang paling diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah wajib memiliki program yang dapat mendukung, khususnya di bidang pertanian. Sektor pertanian sudah dijadikan sebagai sumber dan mata pencaharian bagi masyarakat. Banyak masyarakat bertani karena dinilai dapat memberikan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang mempunyai peran sebagai daerah produksi beras. Kabupaten Klaten pernah menjadi daerah dengan hasil panen yang melimpah, dan pernah menyandang "lumbung padi". Kabupaten Klaten pernah menjadi penghasil beras paling utama di Jawa Tengah. Produktivitas beras Kabupaten Klaten

mencapai 6,3 ton gabah per hektar, dan total luas tanam padi mencapai 72.000 hektar, sehingga Kabupaten Klaten berhasil mencapai surplus beras sekitar 141.000 ton pada tahun 2020. Berdasarkan keputusan pemerintah, ditahun 2021 akan melakukan impor beras yang mendatangkan kontroversi di masyarakat. Kesejahteraan petani beras dan ketahanan pangan membutuhkan harga yang stabil yang dinilai mampu memberikan keuntungan para petani serta mampu meningkatkan hasil produksi. Banyak masyarakat yang menentang dengan adanya keputusan pemerintah perihal impor beras yang dinilai kurang efektif. Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras pada saat petani sedang melakukan panen raya. Di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai daerah penghasil beras, Bupati Klaten sendiri tidak menyetujui dengan keputusan pemerintah yang akan melakukan impor beras. Pasalnya, beras dari hasil panen para petani dinilai sudah cukup melimpah. Terlepas dari penolakan Bupati Klaten para petani juga tentunya menolak jika rencana impor beras benar dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, M. Z. (2015). Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam perspektif kesejahteraan sosial. 18.
- Ani, R. U. (2012). Tren alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten. 8.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Nilai Tukar Petani Juli 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Perkembangan Harga Gabah dan Beras. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Berata, I. K. O. (2013). Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dona, A. (2012). Analisis kesesuaian potensi dan produksi beras di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. 17.

- Habibullah, M. S. (2020). Kemiskinan pedesaan dan kesejahteraan petani di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 120–135.
- Purwito, A., & Indriani. (2015). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rhina Uchyani F., & Supriyadi, W. (2012). Tren alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Klaten. 51.
- Susilo, A. (2013). Panduan Pintar Ekspor Impor. Jakarta: TransMedia Pustaka.